BAB 7

PENUTUP

Di masa Orde Baru, komunisme adalah sebuah ideologi yang sangat diharamkan. Setiap orang yang dianggap komunis atau terkait dengan komunisme (dalam hal ini PKI), hidup –bahkan matinya, sudah pasti sengsara. Yang masih hidup ditangkap, disiksa dan diasingkan. Yang sudah mati, jasadnya tidak bisa ditemukan, sehingga keluarganya tak bisa menguburkannya dengan layak.

Inilah cara penyebaran *hate crime* yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha menjaga kelanggengan kekuasaannya dengan melenyapkan semua pihak yang dianggap musuh. Orde Baru menganggap PKI dan pihak-pihak yang dicap sebagai antek-anteknya –termasuk Lekra, adalah musuh besar yang bisa mengacaukan stabilitas nasional Negara Indonesia.

Pada bab penutup ini, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis juga memberikan sudut pandang baru dalam sejarah, yakni sudut pandang secara kronologis, yang dituangkan dalam saran.

7.1 Kesimpulan

Pada bab I, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama: Mengapa kekerasan tersebut dilakukan oleh negara? Dan pertanyaan kedua: Bagaimana bentuk stigmatisasi terhadap Lekra?

"Mengapa kekerasan tersebut dilakukan oleh negara?" Negara –dalam hal ini pemerintah Orde Baru, melakukan kekerasan untuk melanggengkan kekuasaannya. Segala hal yang berkaitan dengan PKI dan ormas-ormasnya, diberangus dengan brutal. Lekra, yang dianggap sebagai salah satu ormas PKI, juga ikut mengalami kekejaman ini.

Pemerintah Orba menganggap Lekra sebagai ormas PKI lantaran Lekra memiliki ideologi yang sama dengan PKI, yakni sama-sama mengusung tema pembelaan terhadap rakyat. Selain itu —dan ini yang lebih utama, beberapa orang pendiri Lekra adalah juga tokoh-tokoh PKI. Hal terakhir inilah yang membuat cap Lekra sebagai ormas PKI semakin lekat.

Para seniman Lekra sendiri menolak cap ini, namun, pihak yang berkuasa tentu saja lebih kuat. Penguasa tak menghiraukan segala macam protes yang dilayangkan oleh anggota Lekra. Lekra diberi label sebagai komunis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penguasa Orba memang sengaja memasang komunisme sebagai musuh besarnya. Komunisme dianggap sebagai anti Tuhan, dan orang beragama adalah musuh kaum komunis.

Disinilah pemerintah membangun kekuasaanya yang bebas dari pihak yang melawannya. Pemerintah Orde baru bersifat represif dengan menindas rakyatnya sendiri. Louis Althusser menyatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah perangkat penindasan. Negara hadir sebagai bentuk dominasi politik atas masyarakat dalam dua hal, yakni:

- 1. Represive State Apparatus (RSA), yaitu bentuk dominasi melalui pemaksaan dan represif;
- 2. *Ideological State Apparatus* (ISA), yaitu jalur mempengaruhi atau hegemonisasi.

Ideologi adalah wujud hubungan individu yang imajiner dari kondisikondisi nyata, dan Althusser melihat ideologi dalam seluruh tatanan, yang disebut apparatus. Menurut Althusser, salah satu apparatus untuk menjalankan ideologi adalah media massa.

Pemerintah Orde Baru, yang menganggap komunis sebagai musuh besarnya, kerap melakukan aksi penindasan dan stigmatisasi terhadap semua unsur yang berbau komunisme. Salah satu caranya adalah *ideological state apparatus* melalui manipulasi media massa. Lewat media massa, penguasa Orde Baru kemudian mempropagandakan Lekra adalah bagian dari PKI. Siapa saja yang membantu orang-orang Lekra akan dicap sebagai komunis, dan itu berarti musuh negara. Dan, musuh negara tentu sah untuk dilenyapkan. Disini terlihat, penguasa Orde Baru ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara melenyapkan Lekra yang dianggap musuh, dan menakut-nakuti rakyat, agar tidak membantu Lekra. Dengan begitu, pelenyapan Lekra dari sejarah Indonesia akan bisa lebih cepat terjadi.

Pada pertanyaan kedua, penulis mengajukan pertanyaan: "Bagaimana bentuk stigmatisasi negara terhadap Lekra?" Negara memberi stigma merah –yang

berarti PKI, kepada Lekra. Lewat media massa, buku-buku dan bentuk propaganda lainnya, Lekra dicap sebagai bagian dari PKI, komunis dan anti Pancasila. Seniman-seniman Lekra kemudian ditangkap, disiksa dan dibuang. Karya-karya mereka dimusnahkan dan dianggap tidak pernah ada.

Selepas dari tahanan atau pembuangan, para seniman Lekra juga tidak bisa lagi menjalani kehidupannya dengan aman dan nyaman. Pemerintah Orde Baru melarang mereka untuk kembali berkarya dan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Para penulis tidak lagi bisa menulis, sebab nama mereka sudah masuk daftar hitam; pelukis tidak bisa lagi melukis, karena orang takut membeli karyanya; komposer tidak bisa lagi membuat atau menggubah lagu, karena tidak akan ada orang yang mau menggunakan karyanya. Para seniman Lekra, yang ingin terus berkarya, akhirnya menggunakan nama palsu, agar bakat besar mereka tersalurkan. Tentu, mereka juga harus berhati-hati dengan hal ini, sebab, jika ketahuan oleh penguasa, mereka akan mengalami kesulitan. Orang-orang diluar Lekra pun enggan berhubungan dengan seniman-seniman Lekra. Mereka takut dicap sebagai antek komunis, anti Pancasila. Karena itulah para seniman Lekra sulit kembali ke masyarakat. Hanya orang-orang dekat dengan merekalah yang berani berhubungan dan memperkerjakan orang-orang Lekra ini kembali. Itu pun, tentu saja, dengan sembunyi-sembunyi.

7.2 Saran

Sejarah Indonesia memang belum semua terungkap dengan benar. Selama masa kekuasaan pemerintah Orde baru, banyak lembar sejarah, yang dengan kesadaran penuh, sengaja dihilangkan, demi langgengnya kekuasaan.

Pemerintah Orde Baru menggambarkan PKI sebagai pemberontak, terutama setelah peristiwa 1948 dan 1965. Pemberontak dan musuh negara. Cap ini dikeluarkan dan masyarakat dipaksa untuk menelan ini mentah-mentah. Pemerintah Orde Baru sama sekali tidak menyinggung persaingan antara militer dan PKI, pada peristiwa Madiun 1948. Peristiwa G30S juga masih belum jelas hingga kini siapa pelaku sesungguhnya. Pemerintah Orde Baru hanya menjelaskan bahwa PKI-lah yang menjadi aktor pembunuhan para Jenderal pada 1965 itu.

Berkaitan dengan hal ini, penelitian ini mencoba untuk memperkaya sudut pandang sejarah Indonesia, dengan melihatnya melalui perspektif kriminologis. Pemberian stigma oleh negara pada para seniman Lekra, yang menyebabkan mereka sulit untuk hidup dan berkarya, tentu tidak dapat dibenarkan. Negara yang benar tentu saja adalah negara yang menjadi pelindung bagi warga negaranya. Dan tentu saja, warga negara layak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam, dari berbagai sudut pandang, mengenai suatu peristiwa. Dengan demikian, dimensi dari suatu peristiwa menjadi lebih lengkap.

